

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P Parlindungan, 1988, *Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Ed. 1, Cet. 2, Prenadamedia Grou (Divisi Kencana), Jakarta.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2022, *Kecamatan Tilatang Kamang Dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, Agam.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Edisi Revisi, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, *Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan GTRA Tahun 2022*, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta
- Fifik Wiryani, 2018, *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*, Setara Press, Malang.
- Gunawan Wiradi, 2000, *Reformasi Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta.

- H. M. Arba, 2019, *Hukum Agraria Nasional*, Cet.6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John P. Powelson dan Richard Stock, 1987, *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World* . Oegelschlager Gunn And Hain Publisher, Boston.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad Ilham Arisputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Saifullah, 2007, *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia*, Walisongo Pers, Semarang.
- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cet. 10, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Yando Zakaria, 2018, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-konsep Dasar dan Pedoman kajian Lapangan*, Agrarian Resource Center (ARC), Bandung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19, Alfabeta, Bandung.
- Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah*

Perubahan UUD 1945, Tafia Media, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers: Jakarta.

Yudhi Setiawan, dkk, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik (dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan)*, Rajawali Pers, Depok.

Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Jurnal/Publikasi

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Agam, 2022, “Peran GTRA dalam Penyelesaian Potensi Konflik Bekas Lapangan Terbang Peninggalan Jepang Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam”, Rapat Koordinasi Akhir GTRA Kabupaten Agam Tahun 2022.

Maria R. Ruwastuti, 1998, “Menuju Pluralisme Hukum Agraria; Analisa dan Kritik terhadap Menginalisasi Posisi Hukum-hukum dan Hak-hak Adat Penduduk Asli atas Tanah dan Sumber-sumber Agraria oleh Pembuat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA 1960)”, *Kertas Posisi KPA (Position Paper)*, No.006/1998.

Nurhasan Ismail, 2012, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 1, 2012.

Nagari Gadut, 2022, “Kronologis Permasalahan Tanah Masyarakat Gadut dengan TNI-AU Lanud Padang”, Nagari Gadut.

Pansus DPRD Kabupaten Agam, 2016, “Laporan Pansus DPRD Kabupaten

Agam Terhadap Eks. Tanah Lanud AURI di Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang,”. Disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Agam tanggal 6 Februari 2016.

Pemerintahan Nagari Gadut, 2008, “Expose Wali Nagari Gadut”, Kantor Wali Nagari Gadut.

Pinky Chrysantini, 2005, “Memahami Gerakan Pendudukan Tanah Dalam *Land Reform*”, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10, No. 1, Juni 2005.

Rahmat Ramadhani, 2021, “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”, *Jurnal Seminar Nasional Teknologi dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Setyo Utomo, 2021, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara”, *Jurnal Vej*, Volume 7, Nomor 1, 2019.

D. Internet

Kemendikbud, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2022 jam 17:34 WIB.

UK Legislation, “*Law of Property Act*”, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20/section/205>, pada tanggal 27 Oktober 2022 jam 21:06 WIB.